



## **BAB VIII**

# **INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**

Pada bab ini akan dibahas mengenai rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaannya, yang meliputi tahun 2016 sebagai masa peralihan dan keberlanjutan program pada tahun 2017-2021.

### **VIII.1 Masa Peralihan dan Keberlanjutan Program 2016**

Perumusan RKPD Tahun 2016 dilakukan pada Bulan Mei 2015 pada saat masa berlaku Dokumen RPJMD Tahun 2010-2015 telah selesai namun belum dilakukan pemilihan Kepala Daerah untuk periode Tahun 2016-2021. Oleh karena itu terdapat perbedaan perumusan program dalam RKPD Tahun 2016 dengan perumusan Program Tahun 2017-2019 karena perumusan program dalam RKPD tahun 2016 belum menerapkan ketentuan tahapan penyusunan program dalam RPJMD sebagaimana ketentuan dalam Lampiran III dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010, terutama belum mengacu pada upaya pencapaian visi misi walikota dan wakil walikota terpilih Tahun 2016-2021. Selain itu, adanya perbedaan perumusan program juga dipengaruhi oleh perubahan kewenangan pemerintah daerah sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dengan adanya kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak sebagaimana yang diatur dengan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang maka Kota Surabaya sempat mengalami kekosongan kepala daerah. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, maka berdasarkan usulan nama dari Gubernur Jawa Timur, Menteri Dalam Negeri menunjuk Pejabat Sementara (Pj) Walikota Surabaya, dengan masa kepemimpinan sejak berakhirnya kepemimpinan walikota periode tahun 2010-2015 pada bulan September 2015 sampai dengan dilantiknya walikota periode tahun 2016-2021 pada bulan Februari tahun 2016.

Dengan demikian, pada tahun 2016 Pemerintah Kota Surabaya mengalami masa transisi dengan adanya kekosongan RPJMD sebagai dasar penyusunan RKPD. Mengacu ketentuan Pasal 287 ayat (2) dan (3) Permendagri Nomor 54 tahun



2010 bahwa bagi daerah yang tidak memiliki RPJMD, penyusunan RKPD mengacu pada RPJPD dan RPJMD Provinsi. RKPD ini selanjutnya menjadi bagian dalam penyusunan RPJMD tahun 2016-2021, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2016-2021 sesuai hasil pemilihan kepala daerah Tahun 2015 merupakan Walikota dan Wakil Walikota *incumbent*, sehingga sebagian perumusan program ada yang merupakan kelanjutan atau pengembangan terhadap kebijakan RPJMD periode sebelumnya. Penerapan program yang sama dilakukan pada program yang dinilai masih relevan sesuai hasil perumusan sebagaimana tahapan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010.

Sesuai dengan latar belakang kondisi yang disebutkan di atas, maka perumusan program Tahun 2017-2021 sebagian merupakan kelanjutan, pengembangan, penggabungan, perbaikan maupun perumusan program baru/inovasi dari program tahun 2016 sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Tahun 2016. Program akan dilanjutkan jika masih relevan dengan permasalahan pembangunan atau isu strategis yang berkembang, dan arahan program prioritas nasional/provinsi maupun masih relevan terhadap pencapaian visi misi walikota dan wakil walikota. Program dikembangkan jika sesuai hasil analisis perlu dipecah agar relevan dengan pencapaian sasaran/tujuan hasil perumusan. Program digabungkan jika sesuai hasil analisis perlu digabungkan agar lebih efisien dalam pencapaian sasaran/tujuan hasil perumusan. Program diperbaiki jika sesuai hasil analisis, perlu perubahan/perbaikan narasi program untuk mempertajam pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan atau membutuhkan penyesuaian tertentu. Sedangkan perumusan program baru/inovasi jika sesuai hasil analisis, program tersebut diperlukan dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sarasan pembangunan. Selengkapnya mengenai keterhubungan antara program Tahun 2016 dengan program Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel VIII.1.

Pada Tabel VIII.2, program tahun 2016 yang tidak dilanjutkan lagi pada periode berikutnya ditunjukkan dengan kosongnya target indikator dan pagu anggaran pada kolom tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, baik karena telah dikembangkan menjadi program yang berbeda maupun karena tidak relevan lagi dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.



**Tabel VIII.1**  
**Hubungan Program 2016 dengan Program 2017-2021**

Program 2016	Hubungan	Program 2017-2021	Keterangan
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3. Program Pendidikan Menengah	Pengembangan	a. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan b. Program Penerapan Kurikulum c. Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan	Sehubungan dengan adanya pelimpahan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari pemerintah kota ke pemerintah provinsi dalam UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah maka pada tahun 2017-2021 dalam melaksanakan urusan bidang pendidikan tidak menggunakan program berdasarkan jenjang pendidikan (usia dini, dasar, dan menengah), namun program ini dikembangkan berdasarkan aspek-aspek yang mendukung proses pembelajaran yaitu pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan; penerapan kurikulum, dan peningkatan manajemen pengelolaan pendidikan di setiap jenjang pendidikan.
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Berlanjut	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program ini masih relevan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas maka diperlukan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta terdapat permasalahan kualitas, kompetensi, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan.
Program Peningkatan Prestasi Non Akademik	Perbaikan	Program Peningkatan Prestasi	Program ini diperbaiki dengan menghilangkan kata “non akademik” dikarenakan prestasi yang akan diukur adalah prestasi yang diraih oleh siswa, guru maupun lembaganya baik akademik maupun non akademik



Program 2016	Hubungan	Program 2017-2021	Keterangan
Program Pendidikan Non Formal	Pengembangan	a. Program Pendidikan Kesetaraan b. Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan	Program ini dikembangkan menjadi pendidikan kesetaraan untuk memfasilitasi warga belajar yang belum dapat baca tulis maupun warga belajar di usia sekolah yang belum menyelesaikan pendidikannya di jenjang formal melalui layanan PKBM kejar paket A, B, dan C. Sedangkan dalam program pendidikan masyarakat serta lembaga kursus dan pelatihan diharapkan dapat menjamin kepastian dan kualitas layanan pendidikan bagi warga Kota Surabaya yang ingin meningkatkan kemampuan dan keahliannya
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Perbaikan	Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Program diperbaiki dengan menambahkan narasi “pemberian jaminan” karena maksud dari program ini adalah memberikan jaminan kesehatan melalui kepesertaan di BPJS
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Berlanjut	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak	Program ini masih relevan dalam mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas, salah satunya melalui meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang dimulai sejak ibu hamil sampai kelahiran
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Perbaikan	Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak	Program diperbaiki untuk memperjelas kelompok sasaran penyelenggaraan program yaitu ibu dan anak
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	Berlanjut	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu	Program ini masih relevan untuk mewujudkan pemerataan akses pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas layanan diantaranya melalui pembangunan/rehabilitasi puskesmas/puskesmas pembantu dan pengadaan sarana kesehatan yang memadai
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Berlanjut	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Program ini masih relevan karena untuk menjamin kepastian dan kualitas layanan kesehatan harus sesuai dengan standar pelayanan



Program 2016	Hubungan	Program 2017-2021	Keterangan
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Perbaikan	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit	Program ini masih relevan karena untuk mewujudkan pemerataan akses pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas layanan diantaranya melalui pembangunan/rehabilitasi rumah sakit dan pengadaan sarana kesehatan yang memadai
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Pengembangan	a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas/Puskesmas Pembantu b. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit	Program ini dipisahkan antara penyediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk layanan kesehatan masyarakat pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan layanan kesehatan pada fasilitas kesehatan rujukan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Berlanjut	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Program ini masih relevan untuk mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas, salah satunya melalui upaya menjamin kesehatan masyarakat
Program Pengendalian Banjir	Perbaikan	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Drainase Kota	Program diperbaiki karena penekanan program sesuai hasil analisa, lebih diarahkan pada pentingnya pengelolaan sistem drainase dalam mengatasi isu strategis genangan dan banjir
Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Berlanjut	Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Program berlanjut karena masih relevan dalam pencapaian sasaran Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan
Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan	Berlanjut	Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan	Program berlanjut karena masih sangat relevan dalam pencapaian sasaran Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas layanan air bersih
Program Utilitas Perkotaan	Pengembangan	a. Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU b. Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota	Program dikembangkan untuk mempertajam upaya pengembangan pada kelompok sasaran yaitu Penerangan Jalan Umum (PJU) dan pengelolaan Utilitas Kota.



Program 2016	Hubungan	Program 2017-2021	Keterangan
Program Penataan Ruang	Pengembangan	a. Program Perencanaan Ruang Kota b. Program Pemanfaatan Dan Pengendalian Tata Ruang Kota	Program dikembangkan untuk mempertajam upaya penataan ruang melalui aspek perencanaan dan pengendalian
Program Perumahan dan Permukiman	Perbaikan	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program diperbaiki mengacu kepada UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Perbaikan	Program Penegakan Peraturan Daerah	Program diperbaiki dan disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kota Surabaya yaitu penegakan Peraturan Daerah
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Perbaikan	Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan	Program diperbaiki dan disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kota Surabaya yaitu menyelenggarakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Perbaikan	Program Penanggulangan Bencana	Program diperbaiki untuk mengakomodasi sistem mitigasi bencana di kawasan perkotaan yang terintegrasi, termasuk bencana alam dan non alam
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Berlanjut	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Program ini masih relevan dengan upaya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, meliputi PMKS urban dari luar kota Surabaya, pemenuhan kebutuhan dasar dan sarana prasarana panti sosial bagi PMKS, adanya kelompok PMKS yang tidak dapat diberdayakan
Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Berlanjut	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Program ini masih relevan dengan upaya penanganan PMKS melalui keterlibatan potensi sumber kesejahteraan sosial diantaranya lembaga-lembaga sosial, stakeholder, antar pemerintah daerah, dan pemerintah provinsi
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Berlanjut	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Program ini masih relevan dengan upaya pemberdayaan keluarga pra sejahtera yang perlu ditingkatkan kesejahteraannya melalui pelatihan



Program 2016	Hubungan	Program 2017-2021	Keterangan
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Berlanjut	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Program berlanjut karena masih relevan dalam pencapaian sasaran Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja
Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas	Berlanjut	Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas	Program berlanjut karena masih relevan dengan upaya meningkatkan <i>skill</i> dan produktivitas penduduk kota Surabaya.
Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	Berlanjut	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	Program berlanjut karena masih relevan dengan upaya menciptakan harmonisasi hubungan industrial kota Surabaya.
Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan	Berlanjut	Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan	Program berlanjut karena masih relevan dengan upaya melindungi tenaga kerja kota Surabaya.
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Pengembangan	a. Program Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan b. Program Perlindungan Perempuan Dan Anak	Program ini dikembangkan untuk mempertajam upaya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan melalui kesetaraan dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Pengembangan	a. Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman, dan Keamanan Pangan b. Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan	Program ini dikembangkan sebagai penajaman dalam upaya mewujudkan ketahanan dan keamanan pangan.
Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Berlanjut	Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Program berlanjut karena masih relevan dalam pencapaian sasaran Mewujudkan penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum
Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota	Pengembangan	a. Program Pengamanan Aset b. Program Pengelolaan Aset	Program dikembangkan agar fokus pada upaya pengelolaan dan pengamanan aset, tidak hanya sekedar melalui sertifikasi tanah.
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Perbaikan	Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau	Program diperbaiki untuk mengakomodasi peningkatan RTH yang telah terbangun dan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya.



Program 2016	Hubungan	Program 2017-2021	Keterangan
Program Pengelolaan Kebersihan Kota	Perbaikan	Program Pengelolaan Kebersihan	Program diperbaiki untuk mengakomodasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan.
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Perbaikan	Program Pengendalian Dan Pengawasan Dampak Lingkungan	Program diperbaiki untuk mengakomodasi pengawasan dampak lingkungan.
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Pengembangan	a. Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif b. Program Upaya Konservasi Energi	Program dikembangkan untuk mempertajam upaya mewujudkan sumber alternatif energi melalui pengembangan dan pemanfaatan serta konservasi energi
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Berlanjut	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Program ini masih relevan dikarenakan masih terdapat penduduk yang belum taat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan serta adanya dinamika penduduk karena faktor alamiah (kelahiran dan kematian) dan faktor migrasi (penduduk keluar dan penduduk masuk) dalam suatu wilayah
Program Keluarga Berencana	Berlanjut	Program Keluarga Berencana	Program ini masih relevan karena untuk mencapai pembangunan manusia yang berkualitas, perlu diupayakan pengendalian penduduk dan perencanaan keluarga yang berkualitas melalui pengaturan perkawinan dan kelahiran
Program Bina Keluarga	Berlanjut	Program Bina Keluarga	Program ini masih relevan karena untuk mencapai pembangunan manusia yang berkualitas, diawali dari mewujudkan keluarga yang tangguh, memiliki kemampuan psikis dan mental spiritual guna hidup mandiri, serta mengembangkan diri untuk meningkatkan kesejahteraan
Program Pengembangan Sistem Transportasi	Pengembangan	a. Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi b. Program pengembangan sistem transportasi berkelanjutan	Program ini dikembangkan untuk mempertajam upaya pengembangan sistem transportasi melalui peningkatan manajemen dan pengembangan transportasi yang berkelanjutan



Program 2016	Hubungan	Program 2017-2021	Keterangan
-	Inovasi	Program Manajemen Lalu Lintas Angkutan Barang	Program baru sebagai upaya mewujudkan Surabaya sebagai pusat hub dan simpul logistik dalam pengaturan manajemen lalu lintas angkutan barang.
1. Program Komunikasi dan Publikasi Masyarakat 2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Penggabungan	Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat	Program digabungkan untuk mengakomodir perubahan urusan menjadi "komunikasi, informasi, publikasi masyarakat" sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014.
Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Perbaikan	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Program diperbaiki untuk memfokuskan upaya pengembangan pada pelayanan publik administratif berbasis TIK.
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Pengembangan	a. Program perluasan jangkauan pemasaran b. Program perkuatan permodalan usaha mikro c. Program standarisasi produk usaha mikro	Program dikembangkan untuk mempertajam upaya pengembangan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas UMKM secara lebih efektif.
Program Peningkatan Kualitas Koperasi	Pengembangan	a. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi b. Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi	Program dikembangkan agar upaya menjadi lebih fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas Koperasi secara lebih efektif.
-	Inovasi	Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif	Program baru untuk memfasilitasi penumbuhan pelaku sektor kreatif melalui peningkatan keterampilan alternative masyarakat kota yang bernilai ekonomis.
-	Inovasi	Program Legalisasi Usaha Kreatif	Program baru untuk memfasilitasi kemudahan para pelaku industri kreatif untuk mendapatkan legalisasi usaha.



Program 2016	Hubungan	Program 2017-2021	Keterangan
-	Inovasi	Program Perkuatan Permodalan Usaha Kreatif	Program baru untuk memfasilitasi kemudahan para pelaku industri kreatif untuk mendapatkan permodalan usaha.
Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi	Berlanjut	Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi	Program berlanjut karena masih relevan dengan upaya meningkatkan investasi kota Surabaya.
Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Berlanjut	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Program berlanjut karena masih sangat relevan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada misi 1.
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Berlanjut	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Program berlanjut karena masih sangat relevan dalam pencapaian sasaran Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda dalam hal wawasan dan karakter kebangsaan agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan
-	Inovasi	Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik	Program baru untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik
-	Inovasi	Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Program baru untuk mendukung pencapaian sasaran Mewujudkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Berlanjut	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Program ini masih relevan dikarenakan pentingnya mengembangkan budaya baca masyarakat guna mengembangkan budaya literasi dan menjadikan salah satu karakter bagi generasi muda
1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 2. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Penggabungan	Program Penataan, Penyelamatan, dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Penggabungan program dikarenakan perbaikan sistem administrasi kearsipan merupakan bagian dari proses pengelolaan arsip yang terdiri dari penataan, penyelamatan, dan pelestarian



Program 2016	Hubungan	Program 2017-2021	Keterangan
-	Inovasi	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Program baru untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan rencana pada dokumen jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan pada setiap jenjang pemerintahan maupun antar perangkat daerah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Berlanjut	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program ini masih relevan untuk memastikan keterkaitan dan keterpaduan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan pada setiap jenjang pemerintahan maupun antar perangkat daerah
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Berlanjut	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Program ini masih relevan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik maupun instansi melalui penyusunan standart operasional prosedur serta guna menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu terkait penataan kelembagaan
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Berlanjut	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Program ini masih relevan karena dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan diperlukan penyusunan, penyebarluasan kepada masyarakat, dan dokumentasi produk hukum daerah
Program Penataan Daerah Otonom	Berlanjut	Program Penataan Daerah Otonom	Program ini masih relevan dalam rangka penataan kinerja aparatur dan tertib administrasi di kecamatan dan kelurahan
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Perbaikan	Program Peningkatan kapasitas lembaga fasilitator perwakilan rakyat daerah	Narasi program ini diperbaiki dengan menambahkan kata "fasilitator" karena disesuaikan dengan sasaran pengukuran kinerja dalam program tersebut yaitu lembaga fasilitator perwakilan rakyat daerah, bukan lembaga perwakilannya
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Berlanjut	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Program ini masih relevan dikarenakan pentingnya kerjasama antar pemerintah daerah maupun pihak ketiga dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Surabaya



Program 2016	Hubungan	Program 2017-2021	Keterangan
-	Inovasi	Program Kerjasama Bidang Perdagangan	Program baru untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya jaringan bisnis (G to G dan G to B) jasa dan perdagangan komoditi barang dalam skala internasional dan antar pulau yang ditunjang dengan pusat pelayanan informasi yang terintegrasi
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Perbaikan	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	Program ini diperbaiki dengan menghilangkan kalimat "dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH" karena disesuaikan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah pelaksana program
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Berlanjut	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program ini masih relevan dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dalam melayani masyarakat
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pengembangan	a. Program pengembangan kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata b. Program Pemasaran Pariwisata	Program dikembangkan sebagai upaya untuk menjembatani pelibatan seluruh stakeholder bidang Pariwisata di dalam pengembangan pariwisata kota.
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Berlanjut	Program pengembangan destinasi wisata	Program ini masih relevan dengan upaya untuk mencapai sasaran Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan
a. Program Pelayanan Pembibitan dan Penyuluhan pertanian/Perkebunan, Perikanan dan Peternakan b. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan c. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Pengembangan	a. Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura b. Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura c. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian d. Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Peternakan	Program dikembangkan untuk memfokuskan upaya pengembangan pertanian perkotaan pada faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas pada tiap sektor, yaitu Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan peternakan, termasuk pemasaran hasil pertanian tersebut.



Program 2016	Hubungan	Program 2017-2021	Keterangan
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan ternak	Berlanjut	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan ternak	Program ini masih relevan dengan upaya pencapaian sasaran Meningkatkan produktivitas sektor pertanian, pada sektor peternakan
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Berlanjut	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Program ini masih relevan dengan upaya dalam pencapaian sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui perlindungan kepada masyarakat
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengembangan	a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah b. Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Program dikembangkan untuk memfokuskan upaya pada faktor-faktor yang berpengaruh dalam optimalisasi sumber penerimaan daerah
-		Program Peningkatan Kinerja BUMD Pendukung Keuangan Daerah	Program baru untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Perbaikan	Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Program diperbaiki untuk memperjelas pelaksanaannya sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah pelaksana program.
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Perbaikan	Program Perlindungan Budaya Lokal	Program diperbaiki untuk memperjelas upaya pengelolaan yang dilakukan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Perbaikan	Program pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Program diperbaiki untuk memperjelas upaya pengelolaan yang dilakukan
a. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir b. Program Pengembangan Perikanan Tangkap c. Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Penggabungan	a. Program Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan b. Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Budidaya Perikanan dan Kelautan	Program digabung untuk mengefektifkan upaya pemberdayaan dengan peningkatan produktivitas melalui fasilitasi sarana prasarana dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang spesifik pada penerapan teknologi tepat guna



Program 2016	Hubungan	Program 2017-2021	Keterangan
Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Berlanjut	Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Program masih relevan dalam pencapaian sasaran Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik
-	Inovasi	Program pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial	Program baru untuk menunjang perekonomian kota surabaya kategori transportasi dan pergudangan untuk menunjang surabaya sebagai kota perdagangan.
-	Inovasi	Program Peningkatan Investasi fasilitas pendukung logistik	Program baru untuk memfasilitasi kemudahan para pelaku industry kreatif untuk mendapatkan investasi fasilitas pendukung logistik.
a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur b. Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penggabungan	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Program digabung untuk mengefektifkan upaya yang memuat seluruh aspek kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dengan diperkuat dengan penentuan indikator yang mencakup seluruh aspek,
	Inovasi	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Program baru untuk memfasilitasi kemudahan masyarakat dan pelaku usaha untuk mendapatkan perizinan.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Berlanjut	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program berlanjut karena masih relevan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah



## VIII.2 Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

Indikasi rencana program dalam RPJMD Kota Surabaya 2016-2021, terdiri dari program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Walikota Surabaya terpilih yang dikelompokkan dalam program prioritas 1, serta program Perangkat Daerah yang tidak menunjang secara langsung terhadap pencapaian visi dan misi Walikota dalam kelompok program prioritas 2. Pada Tabel VIII.2 RPJMD Tahun 2016-2021 ini, terdapat total 150 program, dengan 66 program yang termasuk ke dalam kelompok prioritas 1 dan 84 Program yang masuk ke dalam kelompok prioritas 2. Program-program pembangunan daerah yang termasuk kelompok prioritas 1 akan dijelaskan melalui uraian di bawah ini.

### A. Program Prioritas Penunjang Visi-Misi sebagai Amanat Nasional

Terdiri dari program-program yang menjadi perwujudan dari penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kesehatan. Selain itu, program-program ini juga turut menunjang pencapaian Misi 1, untuk “Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas”.

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (2016)
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (2016)
3. Program Pendidikan Menengah (2016)
4. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan (2017-2021)
5. Program Penerapan Kurikulum (2017-2021)
6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (2016-2021)
7. Program Peningkatan Prestasi Non Akademik (2016)
8. Program Peningkatan Prestasi (2017-2021)
9. Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan (2017-2021)
10. Program Pendidikan Non Formal (2016)
11. Program Pendidikan Kesetaraan (2017-2021)
12. Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan (2017-2021)
13. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin (2016)



14. Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin (2017-2021)
15. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak (2016-2021)
16. Program Perbaikan Gizi Masyarakat (2016)
17. Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak (2017-2021)
18. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu (dan Jaringannya) (2016-2021)
19. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (2016-2021)
20. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata (2016)
21. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (2017-2021)
22. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan (2016)
23. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas/Puskesmas Pembantu (2017-2021)
24. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit (2017-2021)
25. Program Upaya Kesehatan Masyarakat (2016-2021)

## **B. Program Prioritas Penunjang Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Surabaya**

Terdiri dari program-program lainnya yang berkaitan langsung dalam menunjang pencapaian visi dan misi Walikota Surabaya.

### **Misi 1:**

1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja (2016-2021)
2. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas (2016-2021)

### **Misi 2:**

1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (2016-2021)
2. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (2016-2021)



**Misi 3:**

1. Program Penegakan Peraturan Daerah (2017-2021)
2. Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan (2017-2021)

**Misi 4:**

1. Program Perencanaan Ruang Kota (2017-2021)
2. Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (2016-2021)
3. Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (2017-2021)
4. Program Pengelolaan Kebersihan (2017-2021)
5. Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan (2017-2021)

**Misi 5:**

1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman (2016)

**Misi 6:**

1. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal (2017-2021)
2. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan (2016-2021)

**Misi 7:**

1. Program Pengembangan Hub dan Simpul Logistik untuk Mendukung Distribusi Komoditas Potensial (2017-2021)

**Misi 8:**

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan (2016-2021)
2. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (2017-2021)
3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah (2016-2021)
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah (2017-2021)
5. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (2016-2021)
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (2016-2021)

**Misi 9:**

1. Program Perluasan Jangkauan Pemasaran (2017-2021)
2. Program Standarisasi Produk Usaha Mikro (2017-2021)



3. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi (2017-2021)
4. Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi (2017-2021)
5. Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif (2017-2021)
6. Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi (2016-2021)
7. Program Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan (2017-2021)
8. Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Budidaya Perikanan dan Kelautan (2017-2021)
9. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (2016)
10. Program Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder Bidang Pariwisata (2017-2021)
11. Program Pemasaran Pariwisata (2017-2021)
12. Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura (2017-2021)
13. Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura (2017-2021)
14. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian (2017-2021)
15. Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Peternakan (2017-2021)

**Misi 10:**

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase Kota (2017-2021)
2. Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan (2016-2021)
3. Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan (2016-2021)
4. Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi (2017-2021)
5. Program Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan (2017-2021)

Penjabaran Program Pembangunan Daerah dibagi berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Penunjang Urusan Pemerintahan. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, di dalamnya memuat program-program



penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Urusan Pemerintahan, terdapat urusan yang sifatnya Wajib dan Pilihan. Urusan yang bersifat Wajib, terdiri dari Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar.

Pada Penunjang Urusan Pemerintahan, terdapat program-program yang mengambil fungsi sebagai penunjang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diperlukan oleh tiap Perangkat Daerah untuk bisa menjalankan fungsinya. Pembagiannya meliputi Fungsi Manajemen dan Unsur Manajemen. Fungsi Manajemen terdiri dari Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan; Keuangan; Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah; serta Pengawasan. Sedangkan Unsur Manajemen meliputi Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan; dan Sarana dan Prasarana Perkantoran.

Kerangka indikasi program didapatkan melalui dua cara. Untuk Program Prioritas Tahun 2017-2021 disusun melalui pendekatan penjabaran visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Surabaya. Adapun kerangka pendanaan dilakukan dengan pendekatan estimasi belanja langsung sebagaimana diulas pada Bab III. Sedangkan Program Prioritas Tahun 2016, mengacu pada RKPD Kota Surabaya Tahun 2016. Penjelasan mengenai hal tersebut dapat dilihat pada Tabel VIII.2.



**Tabel VIII.2**  
**Indikasi Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016-2021**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)					
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)				
1	Urusan Pemerintahan																		
1.1	Urusan Wajib																		
1.1.1	Pelayanan Dasar																		
1.1.1.01	Pendidikan																		
1.1.1.01.01	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	99,01%	99%	72.306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	99,02%	61,34%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.01.02	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Kelulusan (AL)SMP/MTs	100,00%	98,90%	638.509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan		
		Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs	99,54%	99,00%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	95,02%	92,67%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	105,03%	88,25%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0%	1,08%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0%	1,08%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	100,00%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	105,24%	96,16%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	95,03%	81,07%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.01.03	Program Pendidikan	Angka Kelulusan (AL) SMA /MA	99,97%	97,80%	265.821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)					
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)				
	Menengah	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	105,08%	87,04%													melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan		
		Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK	100,04%	97,80%															
		Angka Kelulusan (AL) SMK	99,97%	97,80%															
		Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA	0,004%	1,04%															
		Persentase siswa kejuruan yang lulus ujian sertifikasi kompetensi	N/A	100,00%															
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK	92,55%	81,35%															
		Angka Putus Sekolah (APS)SMK	0,007%	1,04%															
1.1.1.01.04	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan	1. Persentase PAUD yang ditingkatkan sarana prasarannya	13,22%		25%	911.005	36,78%	959.296	49,04%	1.018.578	65,95%	1.173.774	79,21%	1.233.370	79,21%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan			
		2. Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SD/MI	97,17%		100%		100%		100%		100%		100%		100%				
		3. Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SMP/MTs	97,17%		100%		100%		100%		100%		100%		100%				
		4. Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SMA/MA/SMK	97,17%		100%		100%		100%		100%		100%		100%				
		5. Persentase lembaga pendidikan SD yang sarana prasarannya sesuai standar	68,60%		70%		71,40%		72,83%		74,28%		75,77%		75,77%				
		6. Persentase lembaga pendidikan SMP yang sarana prasarannya sesuai standar	73,50%		75%		76,50%		78,03%		79,59%		81,18%		81,18%				



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)					
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)				
1.1.1.01.05	Program Penerapan Kurikulum	7. Persentase lembaga pendidikan SMA yang sarana prasarannya sesuai standar	74,07%			75,89%		77,70%		82,98%		85,11%		86,52%		86,52%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan		
		8. Persentase lembaga pendidikan SMK yang sarana prasarannya sesuai standar	72,82%			74,76%		76,70%		77,67%		79,61%		81,55%		81,55%			
		9. Persentase fasilitas pendidikan dalam kondisi baik	44,71%			55,77%		66,83%		77,88%		88,94%		100,00 %		100,00%			
		1. Persentase PAUD yang menerapkan kurikulum sesuai ketentuan	21,05%			35,08%	31.868	49,11%	33.558	68,69%	35.631	79,03%	41.060	86,60%	43.145	86,60%			
		2. Persentase lembaga pendidikan SD yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum	78,40%			80%		81,60%		83,23%		84,90%		86,59%		86,59%			
1.1.1.01.06	Program Peningkatan Mutu	3. Persentase lembaga pendidikan SMP yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum	78,40%			80%		81,60%		83,23%		84,90%		86,59%		86,59%	Perangkat Daerah yang		
		4. Persentase lembaga pendidikan SMA yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum	78,72%			80,14%		81,56%		82,98%		85,11%		86,52%		86,52%			
		5. Persentase lembaga pendidikan SMK yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum	77,67%			79,61%		81,55%		83,50%		84,47%		86,41%		86,41%			
		Persentase pendidik yang kompeten	63,81%	71,05%	98.754		135.863		143.065		151.906		175.052		183.940		Perangkat Daerah yang		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)					
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)				
Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	1. Persentase guru PAUD yang kompeten	58,73%			62,18%		65,63%		69,09%		72,54%		76%		76%	melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan		
		2. Persentase guru SD yang memiliki sertifikasi	57,08%			65,66%		74,23%		82,81%		90,37%		97,92%		97,92%			
		3. Persentase guru SMP yang memiliki sertifikasi	68,00%			74,39%		80,77%		85,93%		90,35%		94,78%		94,78%			
		4. Persentase guru SMA yang memiliki sertifikasi	63,99%			71,88%		79,77%		86,72%		93,19%		98,25%		98,25%			
		5. Persentase guru SMK yang memiliki sertifikasi	60,08%			68,49%		76,91%		84%		90,26%		96,53%		96,53%			
		6. Persentase guru SMP yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar	93,13%			95,43%		97,73%		100%		100%		100%		100%			
		7. Persentase guru SMA yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar	96,74%			97,93%		99,13%		100%		100%		100%		100%			
		8. Persentase guru SMK yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar	93,02%			95,17%		97,31%		100%		100%		100%		100%			
		9. Persentase guru SD yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik yang dibuktikan melalui ijazah S1 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau AKTA 4	84,80%			86,53%		94,79%		100%		100%		100%		100%			
		10. Persentase tenaga kependidikan PAUD yang kompeten	46,48%			53,63%		60,78%		67,93%		75,08%		82,23%		82,23%			
		11. Persentase tenaga kependidikan SD yang kompeten	42,20%			46,37%		50,54%		54,71%		58,88%		63,05%		63,05%			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)					
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)				
		12. Persentase tenaga kependidikan SMP yang kompeten	47,26%			51,82%		56,39%		60,95%		65,51%		70,07%		70,07%			
		13. Persentase tenaga kependidikan SMA yang kompeten	53,24%			55,56%		57,87%		62,50%		67,13%		70,60%		70,60%			
		14. Persentase tenaga kependidikan SMK yang kompeten	45,50%			49,91%		54,32%		58,73%		63,14%		67,55%		67,55%			
1.1.1.01.07	Program Peningkatan Prestasi Non Akademik	Persentase prestasi non akademik	75%	78%	4.849												Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan		
	Program Peningkatan Prestasi	1. Persentase prestasi SD pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	38,46%			45,16%	18.905	46,15%	19.907	62,50%	21.137	64,29%	24.358	71,88%	25.594	71,88%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan		
		2. Persentase prestasi SMP pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	46,15%			50%		50%		62,50%		66,67%		70,59%		70,59%			
		3. Persentase prestasi SMA pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	54,55%			63,64%		63,64%		72,73%		81,82%		81,82%		81,82%			
		4. Persentase prestasi SMK pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	21,15%			25%		28,85%		32,69%		36,54%		40,38%		40,38%			
		5. Persentase PAUD berprestasi	0,59%			1,14%		1,70%		2,25%		2,81%		3,36%		3,36%			
1.1.1.01.09	Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan	1. Persentase lembaga pendidikan SD yang tertib administrasi	52,76%			56,82%	1.416	60,88%	1.491	64,94%	1.583	68,99%	1.824	73,05%	1.917	73,05%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)					
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)				
1.1.1.01.09	Pendidikan	2. Persentase lembaga pendidikan MI yang tertib administrasi	36,24%			39,60%		42,95%		46,31%		49,66%		53,02%		53,02%	Pemerintahan Bidang Pendidikan		
		3. Persentase lembaga pendidikan SMP yang tertib administrasi	47,04%			64,44%		81,85%		83,70%		85,56%		87,04%		87,04%			
		4. Persentase lembaga pendidikan MTs yang tertib administrasi	28,57%			38,78%		48,98%		59,18%		69,39%		79,59%		79,59%			
		5. Persentase lembaga pendidikan SMA yang tertib administrasi	44,68%			50%		55,32%		60,64%		65,96%		71,28%		71,28%			
		6. Persentase lembaga pendidikan MA yang tertib administrasi	18,75%			25%		31,25%		43,75%		56,25%		68,75%		68,75%			
		7. Persentase lembaga pendidikan SMK yang tertib administrasi	54,55%			59,60%		64,65%		69,70%		73,74%		83,84%		83,84%			
		Persentase lembaga kursus dan pelatihan yang siap untuk diakreditasi	22,69%	25%	39.637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.01.10	Program Pendidikan Non Formal	Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan	N/A	90%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan		
		Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan	N/A	90%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.01.11	Program Pendidikan Kesetaraan	1. Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket A	68,93%			70%	1.959	71,07%	2.063	72,14%	2.191	73,21%	2.524	74,29%	2.652	74,29%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan		
		2. Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket B	87,74%			88,12%		88,51%		88,89%		89,27%		89,66%		89,66%			
		3. Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket C	90,72%			90,85%		90,98%		91,11%		91,24%		91,37%		91,37%			
1.1.1.01.12	Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus	1. Persentase lembaga kursus dan pelatihan yang mendaftar proses akreditasi	5,34%			5,53%	37.157	5,73%	39.126	5,93%	41.544	6,13%	47.874	6,32%	50.305	6,32%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kota Surabaya 2016 - 2021

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)					
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)				
	dan Pelatihan	2. Persentase pertumbuhan peserta didik yang mengikuti pendidikan masyarakat	0,00%			0%		1,04%		2,08%		3,13%		4,17%		4,17%	Pemerintahan Bidang Pendidikan		
1.1.1.02	Kesehatan																		
1.1.1.02.01	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan terlayani	100%	100%	161.694												Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		
1.1.1.02.02	Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	1. Persentase Kepemilikan Jaminan Kesehatan	100%			100%	188.539	100%	198.533	100%	210.802	100%	242.921	100%	255.255	100%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		
		2. Persentase penduduk miskin yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	10%			11%		12%		13%		14%		15%		15%			
1.1.1.02.03	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan kunjungan bayi	90%	90%	3krea0.395		29.896		31.481		33.426		38.520		40.475		Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		
		1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	98,43%			98,45%		98,47%		98,48%		98,49%		98,50%		98,50%	98,50%		
		2. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinkakes)	96,93%			96,94%		96,95%		96,96%		96,97%		96,98%		96,98%	96,98%		
		3. Cakupan Kunjungan neonatal lengkap	78%			81%		85%		90%		93%		95%		95%	95%		
		4. Cakupan Imunisasi dasar lengkap	93,79%			93,81%		93,83%		93,85%		93,87%		94%		94%	94%		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)					
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)				
1.1.1.02.04	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi Balita Kurang Gizi (< 20 %)	14,41%	< 20%	10.213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		
1.1.1.02.05	Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak	1. Prevalensi Balita Gizi kurang	9,50%	-	-	9,50%	-	9,50%	-	9,50%	-	9,50%	-	9,50%	-	9,50%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		
		2. Prevalensi Balita gizi buruk	< 1%	-	-	< 1%	-	< 1%	-	< 1%	-	< 1%	-	< 1%	-	< 1%	< 1%		
		3. Persentase Penimbangan balita	81,20%	-	-	81,30%	-	81,40%	-	81,50%	-	81,60%	-	81,70%	-	81,70%	81,70%		
		4. Persentase ibu hamil yang mendapatkan 90 tablet Fe	94,60%	-	-	94,62%	-	94,64%	-	94,66%	-	94,68%	-	94,70%	-	94,70%	94,70%		
		1. Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu	70%	72%	37.507	74%	44.529	76%	46.890	78%	49.787	78,50%	57.373	80%	60.286	80%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		
1.1.1.02.06	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu (dan Jaringannya)	2. Prosentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik	40,87%	-	-	52,70%	-	64,52%	-	76,35%	-	88,17%	-	100%	-	100%	100%		
		Persentase sarana kesehatan berizin yang memenuhi standar sarana kesehatan	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		
		Persentase tenaga kesehatan yang terregistrasi	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		
		1. Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin	80%	-	-	82%	-	84%	-	86%	-	88%	-	90%	-	90%	90%		
		2. Persentase sarana kesehatan yang memiliki izin	80%	-	-	82%	-	84%	-	86%	-	88%	-	90%	-	90%	90%		
1.1.1.02.07	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase sarana kesehatan berizin yang memenuhi standar sarana kesehatan	100%	100%	70.914	-	75.145	-	79.129	-	84.019	-	96.820	-	101.736	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		
		Persentase tenaga kesehatan yang terregistrasi	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		
		1. Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin	80%	-	-	82%	-	84%	-	86%	-	88%	-	90%	-	90%	90%		
		2. Persentase sarana kesehatan yang memiliki izin	80%	-	-	82%	-	84%	-	86%	-	88%	-	90%	-	90%	90%		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)					
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)				
		3. Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada	71%			72%		73%		74%		75%		76%		76%			
		4. Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit dr. Mohamad Soewandie	75%			76%		77%		78%		79%		79,50%		79,50%			
1.1.1.02.08	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar RSUD dr. Mohamad Soewandie	70%	75%	93.666												Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar RSUD Bhakti Dharma Husada	80%	80%															
1.1.1.02.09	Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	1. Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandie sesuai standar tipe rumah sakit	75%		156.581	78%	164.881	80%	175.070	82%	175.070	84%	201.745	85%	211.988	85%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		
		2. Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai standar tipe rumah sakit	80%			85%		85%		90%		90%		90%		90%			
		3. Rata-rata waktu tunggu layanan operasi elektif RSUD Bhakti Dharma Husada	8 hari			10 hari		10 hari		5 hari		4 hari		3 hari		3 hari			
		4. Rata-rata waktu tunggu layanan rawat jalan RSUD Bhakti Dharma Husada	49 menit			47 menit		45 menit		43 menit		41 menit		40 menit		40 menit			
		5. Rata-rata waktu tunggu layanan operasi elektif RSUD dr. Mohamad Soewandie	48 hari			48 hari		48 hari		45 hari		43 hari		36 hari		36 hari			
1.1.1.02.10	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan	80%	82%	120.214												Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)					
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)				
		Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD dr. M. Soewandie	100%	100%													Pemerintahan Bidang Kesehatan		
		Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada	100%	100%															
1.1.1.02.11	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan puskesmas/puskesmas pembantu	1. Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan	100%			100%	44.683	100%	47.051	100%	49.959	100%	57.571	100%	60.494	100%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		
1.1.1.02.12	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan rumah sakit	1. Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD dr. M. Soewandie	100%			100%	81.953	100%	86.297	100%	91.630	100%	105.592	100%	110.953	100%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		
		2. Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada	100%			100%		100%		100%		100%		100%		100%	100%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	
1.1.1.02.13	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Masyarakat Yang Terlayani Pelayanan Khusus	N/A	100%	75.070		62.320		65.624		69.679		80.296		84.373		Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		
		Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam	100%	100%															
		Persentase sampel yang memenuhi syarat keamanan makanan olahan	80%	80%															
		1. Persentase rumah sehat	73,50%		75%		76,50%		78%		79,50%		80%		80%				
		2. Persentase TPM memenuhi syarat higienis sanitasi	80%		81%		82%		83%		84%		85%		85%				



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kota Surabaya 2016 - 2021

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)					
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)				
		3. Cakupan Kelurahan Yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	80%			82%		84%		86%		88%		90%		90%			
1.1.1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
1.1.1.03.01	Program Pengendalian Banjir	Tingkat Genangan	44,21	30,7	550.334												Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.1.1.03.02	Program pengembangan dan pengelolaan sistem drainase kota	1. Lama genangan (menit)	52 menit			51 menit	656.288	50 menit	691076,246	49 menit	733782,842	47 menit	845586,2042	45 menit	888.519	45 menit	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		2. Luas genangan (ha)	1239 ha			1209 ha		1179 ha		1150 ha		1122 ha		1094 ha		1094 ha			
		2. Tinggi genangan (cm)	16 cm			16 cm		15 cm		15 cm		14 cm		14 cm		14 cm			
		3. Persentase pembangunan jaringan drainase yang selesai tepat waktu	80%			80%		80%		80%		80%		80%		80%			
1.1.1.03.03	Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Penambahan jalan baru	1683 m2	1000 m2			260.245		280.321		295.181		313.422		361.177		379.515		
		Persentase jalan dalam kondisi baik	98,64%	94,95%															
		Persentase Penyediaan Prasarana Pejalan Kaki	0% (38168 m)	3,80%				0,24%		0,36%		0,48%		0,59%		0,71%			
		1. Persentase Jalan yang Terbangun (%)	0,12%					11,45%		17,18%		22,91%		28,64%		0,71%			
		2. Persentase penyediaan prasarana pejalan kaki (%)	5,73%					5,16%		7,74%		10,32%		12,90%		34,36%			
		3. Persentase jalan yang mendapatkan perbaikan (%)	2,58%													15,48%	15,48%		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)					
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)				
		4. Persentase Pembangunan Jaringan Jalan dan Jembatan yang selesai tepat waktu	80%			80%		80%		80%		80%		80%		80%			
1.1.1.03.04	Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan	Penambahan Jaringan Infrastruktur Air Bersih	N/A	2000 m	6.103		1.801		1.897		2.014		2.321		2.438		Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		1. Persentase pelanggan baru PDAM (%)	4,48%			9,22%		14,32%		15,07%		15,83%		16,59%		16,59%			
1.1.1.04.05	Program Utilitas Perkotaan	Lama perbaikan PJU padam <6 jam	N/A	64%	193.852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		Panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan	2365920 meter	2431470 meter		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Persentase penggunaan LED untuk PJU	8,75%	13%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.03.06	Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU	1. Panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan	2480250 m			2540250 m	194.319	2600250 m	204.619	2660250 m	217.264	2720250 m	250.368	2780250 m	263.080	2780250 m		Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		2. Persentase pemasangan PJU hemat energi	42,79%			64,49%		74,26%		79,81%		83,39%		85,90%		85,90%			



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kota Surabaya 2016 - 2021

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)					
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)				
1.1.1.03.07	Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota	Persentase rekomendasi utilitas yang dikeluarkan dibanding permohonan utilitas yang memenuhi syarat	100%			100%	635	100%	669	100%	710	100%	818	100%	860	100%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.1.1.03.08	Program Penataan Ruang	Proporsi luas area yang telah terlayani sistem informasi rencana tata ruang kota	10%	20%	32.556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.1.1.03.09	Program Perencanaan Ruang Kota	1. Persentase rencana induk sektoral yang disusun	57,14%			64,29%	6.461	78,57%	6.804	85,71%	7.224	92,86%	8.325	100%	8.748	100%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.1.1.03.10		2. Persentase rencana rinci tata ruang yang disusun	40%			46,67%		53,33%		60%		66,67%		73,33%		73,33%			
	Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota	1. Persentase jumlah bangunan yang ber IMB	51,96%			53,48%	6.998	55,13%	7.369	56,93%	7.824	58,81%	9.016	60,79%	9.474	60,79%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		2. Persentase tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran IMB	100%			100%		100%		100%		100%		100%		100%			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)					
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)				
1.1.1.04	Perumahan dan Kawasan Permukiman																		
1.1.1.04.01	Program Perumahan dan Permukiman	Luas kawasan perumahan permukiman yang mendapat peningkatan layanan sarana prasarana	120,06 Ha	591,51 Ha	359.704												Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		
		Jumlah MBR yang telah mendapatkan rumah layak huni	3479 KK	3691 KK															
1.1.1.04.02	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya	43,05%			49,20%	369.194	55,35%	388.764	61,50%	412.789	67,65%	475.684	73,80%	499.836	73,80%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		
		2. Persentase Pelayanan Sanitasi Permukiman	33%			46%		59%		72%		85%					100%		
		3. Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	3,47%			12%		23%		35%		47%					58%		
		4. Persentase rumah tinggal tapak tidak layak huni yang diperbaiki	N/A			20%		40%		60%		80%					100%		
1.1.1.05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																		
1.1.1.05.01	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase tertingginya kasus pelanggaran peraturan	100%	100%	48.867													Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)					
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)				
1.1.1.05.02	Program Penegakan Peraturan Daerah	1. Persentase pelanggaran Perda terkait Reklame yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100%			100%	34.776	100%	36.619	100%	38.882	100%	44.807	100%	47.082	100%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketertiban dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		
		2. Persentase pelanggaran Perda terkait PKL, PSK, Anjal, Gepeng, dan RHU yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100%			100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		3. Persentase pelanggaran Perda terkait HO, IMB, Kebersihan, Parkir Umum, dan Perda lainnya yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100%			100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		4. Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketertiban dan ketertiban umum	100%			100%		100%		100%		100%		100%		100%			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)					
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)				
1.1.1.05.03	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase tertanganinya konflik di masyarakat	100%	100%	21.576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		
1.1.1.05.04	Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan	1. Persentase tertanganinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	100%			100%	30.779	100%	32.410	100%	34.413	100%	39.656	100%	41.670	100%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		
		2. Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dan difasilitasi yang berjalan dengan lancar	100%			100%		100%		100%		100%		100%		100%	Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		
1.1.1.04.05	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Pencapaian waktu tanggap kurang dari 15 menit	99.34%	90%	41.415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		
		Jumlah penduduk Surabaya yang memiliki pengetahuan mengenai pencegahan dan penanganan kebakaran	6459 orang	7427 Orang		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Persentase pemenuhan kebutuhan jumlah sarana prasarana kebakaran eksisting dibanding kebutuhan ideal	64%	66%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kota Surabaya 2016 - 2021

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)					
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)				
1.1.1.05.06	Program Penanggulangan Bencana	1. Angka kejadian kebakaran gedung/bangunan per 1 juta penduduk Surabaya	55 kejadian			54 kejadian	45.673	54 kejadian	48.094	53 kejadian	51.066	53 kejadian	58.846	52 kejadian	52 kejadian	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketertiban dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			
		2. Angka kejadian kebakaran non bangunan per 1 juta penduduk Surabaya	111 kejadian			110 kejadian		110 kejadian		109 kejadian		109 kejadian		108 kejadian	108 kejadian	108 kejadian			
		3. Persentase waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit	94%			95%		96%		97%		98%		99%	99%	99%			
		4. Persentase waktu tanggap ≤ 24 jam penanggulangan kejadian bencana alam	100%			100%		100%		100%		100%		100%	100%	100%			
		5. Persentase kelurahan tangguh bencana	10%			29%		49%		68%		88%		100%	100%	100%			
1.1.1.06	Sosial																		
1.1.1.06.01	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	70%	60%	171.060	60%	167.132	60%	175.991	60%	186.867	60%	215.339	60%	226.272	60%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial		
1.1.1.06.02	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	1. Persentase terfasilitasinya kegiatan keagamaan dan nilai-nilai kepahlawanan	N/A	100%	18.229		2.484		2.616		2.777		3.201		3.363		Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial		
1.1.2	Non Pelayanan Dasar																		
1.1.2.01	Tenaga Kerja																		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)					
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)				
1.1.2.01.01	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja terserap pada pasar kerja	68%	> 40%	11.495	5%	4.047	5%	4.261	5%	4.525	5%	5.214	5%	5.479	5%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja		
		1. Persentase pertumbuhan kesempatan kerja yang dapat diinformasikan	5%	5%															
1.1.2.01.02	Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas	2. Persentase Pemuda yang membuka wirausaha mandiri	N/A	15%															
		Persentase Angkatan Kerja yang Lulus sertifikasi	62%	> 50%	2.231	62%	15.320	64%	16.132	66%	17.128	68%	19.738	70%	20.740	70%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja		
		1. Persentase Angkatan Kerja yang Lulus sertifikasi	N/A	77%															
1.1.2.01.03	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	2. Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi yang lulus pelatihan	N/A	79%															
		Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama	6,26%	6,51%	2.059	6,67%	2.448	7,01%	2.578	7,26%	2.737	7,51%	3.154	7,76%	3.315	7,76%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja		
1.1.2.01.04	Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang mematuhi norma ketenagakerjaan dan/atau K3	25,84%	33,00%	1.706	43%	1.142	52%	1.202	61%	1.277	73%	1.471	83%	1.546	83%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja		
		Persentase Perusahaan Yang Telah Diperiksa dan mematuhi Norma ketenagakerjaan dan/norma K3	N/A	52%															
1.1.2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)					
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)				
1.1.2.02.01	Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Percentase indikator PUG tingkat kecamatan yang terpenuhi	100%	-	-	100%	1.818	100%	1.915	100%	2.033	100%	2.343	100%	2.462	100%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
1.1.2.02.02	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Percentase Permasalahan Perempuan dan Anak yang ditangani	100%	100%	9.130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
		Percentase indikator Pengarusutamaan Gender (PUG) yang terpenuhi	86%	86%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
		Percentase indikator Kota Layak Anak (KLA) yang terpenuhi	87%	93%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
1.1.2.02.03	Program perlindungan perempuan dan anak	1. Percentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani	100%	-	6.764	100%	7.123	100%	7.563	100%	8.715	100%	9.157	100%	100%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
		2. Percentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A)	N/A	-		65,21%		66,35%		66,86%		67,15%		68,10%		68,10%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
		3. Percentase jejaring yang berperan dalam penanganan permasalahan terhadap perempuan dan anak	5%	-		10%		21%		35%		48%		64%		64%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
		4. Percentase berfungsi fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
1.1.2.03	Pangan																		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab												
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)															
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)														
1.1.2.03.01	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Tersedianya Informasi Ketersediaan dan Distribusi Pangan	100%	100%	1.988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan													
		Tingkat Keamanan Produk Pangan	82%	> 80%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
1.1.2.03.02	Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman, dan Keamanan Pangan	1. Tingkat keamanan bahan pangan segar yang beredar	80%	5.717	81%	82%	6.020	83%	6.392	84%	7.366	85%	7.740	85%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan														
		2. Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan	80%																										
		3. Tingkat keanekaragaman konsumsi masyarakat (PPH)	95																										
1.1.2.04	Pertanian																												
1.1.2.04.01	Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan umum	N/A	43367 m <sup>2</sup>	183.282	193.726	203.995	216.601	249.604	262.277	7.403 Ha	7.403 Ha	7.403 Ha	7.403 Ha	7.403 Ha	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian													
		Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum	1,4027 Ha	19,30 Ha																									
		Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	7,14 Ha																										
1.1.2.04.02	Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota	Rasio aset pemkot yang tersertifikat	48.84%	55,72%	8.801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian												



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kota Surabaya 2016 - 2021

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)					
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)				
1.1.2.04.03	Program pengamanan aset	Persentase tanah aset yang telah dilakukan pemagaran, papan, patok	12,85%			14,52%		16,18%		17,85%		19,52%		21,18%		21,18%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan		
		Persentase tanah aset yang tersertifikasi	11,58%			12,08%		12,62%		13,22%		13,85%		14,52%		14,52%			
		Persentase kasus tanah dan/atau bangunan yang ditangani	100%			100%		100%		100%		100%		100%		100%			
1.1.2.04.04	Program pengelolaan aset	Persentase aset tanah dan/atau bangunan yang tercatat pemanfaatannya	N/A			25,22%		16.190	43,92%	17.049	62,62%	18.102	81,30%	20.860	100%	21.920	100%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	
1.1.2.05	Lingkungan Hidup																		
1.1.2.05.01	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Luas RTH yang berfungsi optimal terhadap keseluruhan luas RTH yang ada	34,56%	41,15%	62.721												Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup		
1.1.2.05.02	Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau	Persentase pertumbuhan luas RTH yang dipelihara dan diawasi	1,87%			3,66%		79.672	5,40%	83.895	7,07%	89.080	8,68%	102.652	10,24%	107.864	10,24%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
		Persentase luas RTH yang dibangun dan ditingkatkan fungsinya	20,49%			34,01%				43,60%		50,76%		56,31%		60,73%	60,73%		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)					
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)				
1.1.2.05.03	Program Pengelolaan Kebersihan Kota	Jumlah Sampah Yang Dikelola di TPA	1477,65 ton/hari	1400 ton/hari	302.294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup		
		Rata - rata Jumlah Sampah Yang Diangkut dari TPS	3940,43 m3/hari	3500 m3/hari		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Cakupan Layanan Kebersihan	185 TPS	187 TPS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.2.05.04	Program pengelolaan kebersihan	Persentase pembangunan fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R	8,33%	-	7,69%	315.506	15,38%	332.230	23,08%	352.761	30,77%	406.510	38,46%	427.150	38,46%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup			
		Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	0% (1372 komunitas)	-		2,19%	4,37%	-	6,56%	-	8,75%	-	10,93%	-	10,93%	-			
		Persentase pengangkutan sampah dari TPS ke TPA yang ≤ 1 hari	80,54%	-		81,62%	82,70%	-	83,78%	-	84,86%	-	85,95%	-	85,95%	-			
1.1.2.05.05	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	- Tingkat kualitas air limbah industri COD	71,77%	71%	13.287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup		
		- Tingkat kualitas air limbah rumah sakit BOD	72,09%	71%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		- Tingkat kualitas air limbah hotel COD	47,05%	47%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		- Tingkat kualitas air limbah industri TSS	74,07%	73%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		- Tingkat kualitas air limbah rumah sakit COD	72,65%	71%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		- Tingkat kualitas air limbah hotel TSS	52,58%	51%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		- Tingkat kualitas air limbah domestik BOD	56,02%	53%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		- Tingkat kualitas air limbah rumah sakit TSS	74,01%	73%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		- Tingkat kualitas udara emisi di kawasan industri SO2	87,15%	86%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)					
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)				
1.1.2.05.06	Program pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan	- Tingkat kualitas air limbah industri BOD	77,91%	77%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup		
		- Tingkat kualitas air limbah domestik TSS	55,26%	55%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		- Tingkat kualitas air limbah hotel BOD	58,42%	57%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		- Tingkat kualitas udara emisi di kawasan industri NO2	86,24%	86%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.1.2.05.07	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Persentase ketataan/kepatuhan terhadap aspek lingkungan	40%	-	50%	10.585	60%	11.147	70%	11.835	80%	13.639	95%	14.331	95%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup			
		Persentase dokumen pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan yang tersusun	50%	-	60%		70%		80%		90%		100%		100%				
1.1.2.05.08	Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif	Jumlah pengusahaan Energi baru dan terbarukan yang dikembangkan	1 kegiatan	4 kegiatan	1.652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup		
		Akumulasi entitas lingkungan yang berperan serta dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	4 lingkungan	-	6 lingkungan	3.977	8 lingkungan	4.188	10 lingkungan	4.447	12 lingkungan	5.125	14 lingkungan	5.385	14 lingkungan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup			
		Akumulasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan	29 unit	-	33 unit		37 unit		41 unit		45 unit		49 unit		49 unit				



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)					
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)				
1.1.2.05.09	Program Upaya Konservasi Energi	Akumulasi kegiatan dan/atau usaha yang telah menerapkan konservasi energi	113 kegiatan dan / atau usaha		-	124 kegiatan dan / atau usaha	278	134 kegiatan dan / atau usaha	293	144 kegiatan dan / atau usaha	311	154 kegiatan dan / atau usaha	358	164 kegiatan dan / atau usaha	376	164 kegiatan dan / atau usaha	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup		
1.1.2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																		
1.1.2.06.01	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1. Persentase ketepatan waktu pengurusan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)	45,54%	99,56%	17.657	99,57%	83.214	99,65%	87.626	99,69%	93.041	99,75%	107.217	99,94%	112.660	99,94%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
		2. Cakupan penerbitan akte kelahiran (berdasarkan data SIAK)	99,55%	99,56%		99,57%		99,60%		99,69%		99,75%		99,94%		99,94%			
		3. Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk (KTP dan KK)	70%	85%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		4. Cakupan penerbitan akte kematian (berdasarkan data SIAK)	70%	85,51%		86,55%		87,50%		87,55%		88%		89,51%		89,51%			
		5. Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)	89,00%	93,91%		93,92%		93,93%		93,94%		93,95%		93,96%		93,96%			
		6. Persentase jenis data kependudukan yang dimanfaatkan	100%			100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		7. Persentase sistem pelayanan publik berbasis SIAK	100%			100%		100%		100%		100%		100%		100%			



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kota Surabaya 2016 - 2021

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)					
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)				
		8. Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan	100%			100%		100%		100%		100%		100%		100%			
1.1.2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
1.1.2.08.01	Program Keluarga Berencana	Persentase Pasangan Usia Subur yang ber-KB Aktif	75,00%	76,32%	3.622	3.659	3.853	4.091	4.715	4.954	84,35%	80,95%	4,90%	19,95%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
		1. Persentase peserta KB baru	80,35%																
		2. Persentase peserta KB aktif	76,32%																
		3. Persentase peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi	6,10%																
		4. Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	21,25%																
1.1.2.08.02	Program Bina Keluarga	1. Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif	14,22%	23,90%	651	47,90%	566	70,39%	596	92,89%	633	100%	729	100%	766	100%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		2. Persentase pasangan usia subur yang usia istrinya kurang dari 20 tahun	3,50%																
1.1.2.08.03	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Data Keluarga Miskin	100%	100%	14.238	15.698	16.530	17.552	20.226	21.253	75%	75%	75%	75%	75%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
		Persentase Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) yang berdaya	0%	1% (859 kelompok)															
		Persentase PMKS usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang berproduksi	75%																



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)					
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)				
1.1.2.09	Perhubungan																		
1.1.2.09.01	Program Pengembangan Sistem Transportasi	Rata-rata Headway Angkutan Umum	Angkot 26.21 Bis Kota 43.86	Angkot 25,91 menit Bis Kota N/A	180.449												Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan		
		Kecepatan perjalanan rata-rata kendaraan di Jalan Arteri Sekunder	28.79 km/jam	30 km/jam															
		Penggunaan kendaraan umum (Load Factor)	26.69%	35,54%															
		Kecepatan perjalanan rata-rata kendaraan di Jalan Arteri Primer	28.88 km/jam	30 km/jam															
1.1.2.09.02	Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi	Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	28,9 km/jam		29,19 km/jam	183.751	30,06 km/jam	193.492	31,27 km/jam	205.449	31,89 km/jam	236.752	32,53 km/jam	248.773	32,53 km/jam	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan			
		Persentase selisih tingkat kecelakaan lalu lintas	2%				2%		2%		2%		2%		2%				
1.1.2.09.03	Program pengembangan sistem transportasi berkelanjutan	Rata-rata headway angkutan umum (Angkot/feeder)	26 menit			30.708	25 menit	32.336	25 menit	34.334	23 menit	39.566	23 menit	41.574	23 menit	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan			
		Rata-rata headway angkutan umum (Bus Kota)	43,32 menit				42,57 menit		42,57 menit		41,83 menit		40,54 menit		40,54 menit				
		Persentase penyediaan sarana prasarana pendukung transportasi berkelanjutan	100%				100%		100%		100%		100%		100%	100%			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)					
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)				
1.1.2.09.04	Program manajemen lalu lintas angkutan barang	Rata-rata waktu tempuh kendaraan barang dari dan menuju hub	120,4 menit			112,88 menit	421	106,24 menit	443	100,33 menit	471	95,05 menit	543	90,3 menit	570	90,3 menit	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan		
1.1.2.10	Komunikasi dan Informatika serta Persandian																		
1.1.2.10.01	Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase layanan publik yang berbasis TIK	26.85%	46,10%	39.222												Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika serta Persandian		
1.1.2.10.02	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1. Persentase layanan publik administratif yang berbasis TIK 2. Persentase pengelolaan jaringan telekomunikasi pendukung pelayanan publik	28,01%			31,56%	54.924	35,11%	57.836	38,65%	61.410	42,20%	70.766	45,74%	74.359	45,74%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika serta Persandian		
							100%			100%		100%		100%		100%			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)					
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)				
1.1.2.10.03	Program Komunikasi dan Publikasi Masyarakat	Persentase berita positif Pemerintah Kota Surabaya yang diinformasikan kepada masyarakat	81%	83%	6.159												Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika serta Persandian		
1.1.2.10.04	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rata-rata kunjungan per bulan pada website www.surabaya.go.id	155262 kunjungan	199768 kunjungan	12.918												Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika serta Persandian		
		Angka partisipasi masyarakat pada kegiatan-kegiatan diseminasi informasi	2000 kunjungan/ peserta	57154 kunjungan/ peserta													Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika serta Persandian		
1.1.2.10.05	Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat	1. Persentase berita positif Pemerintah Kota Surabaya yang terinformasikan kepada masyarakat	83%		43.100	83%	18.389	84%	19.364	84%	20.560	85%	23.693	85%	24.896	85%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika serta Persandian		
		2. Rata-rata pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran komunikasi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya	8428 kunjungan			8765 kunjungan		9116 kunjungan		9481 kunjungan		9860 kunjungan		10254 kunjungan		10254 kunjungan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika serta Persandian		
1.1.2.11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah																		
1.1.2.11.01	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Peningkatan volume usaha Kecil menengah binaan	Rp. 35.910 juta	10%	43.100												Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah		
		Akumulasi jumlah Usaha Mikro yang mengisi sentra binaan	761 pedagang	810 Pedagang													Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah		
		Persentase peningkatan volume usaha mikro binaan	Rp 765 juta	10%													Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)					
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)				
1.1.2.11.02	Program perkuatan permodalan usaha mikro	Persentase usaha mikro yang berhasil mendapatkan bantuan permodalan	N/A			4%	203	4%	214	5%	227	5%	262	6%	275	6%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah		
1.1.2.11.03	Program standarisasi produk usaha mikro	1. Persentase Usaha Mikro yang mengaplikasikan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam proses usaha	N/A			20%	4.948	25%	5.210	30%	5.532	35%	6.375	40%	6.698	40%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah		
		2. Persentase produk Usaha Mikro yang layak diuji mutukan	N/A																
1.1.2.11.04	Program Peningkatan Kualitas Koperasi	Persentase peningkatan jumlah koperasi tidak aktif yang berhasil direvitalisasi	0% (79 koperasi)	6%	4.907												Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah		
		Persentase peningkatan jumlah koperasi berkualitas	0% (268 koperasi)																



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)					
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)				
		Persentase peningkatan volume usaha koperasi aktif	0% (Rp. 1.604.549 Juta)	1%															
		Tingkat pertumbuhan anggota koperasi	252645 orang	0,39%															
1.1.2.11.05	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi berklasifikasi AAB	42,61%		57,81%	2.131	62,21%	2.244	66,24%	2.383	69,95%	2.746	77,05%	2.885	77,05%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah			
1.1.2.11.06	Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi	Tingkat pertumbuhan koperasi yang meningkat volume usahanya	N/A		68%	3.618	73%	3.810	78%	4.046	83%	4.662	88%	4.899	88%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah			
1.1.2.12	Penanaman Modal																		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kota Surabaya 2016 - 2021

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)					
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)				
1.1.2.12.01	Program Peningkatan Investasi fasilitas pendukung logistik	Tingkat pertumbuhan investasi fasilitas pendukung logistik	N/A			18%	36	24%	38	30%	40	36%	46	42%	48	42%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal		
1.1.2.12.02	Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi	Percentase Meningkatnya jumlah realisasi ijin penunjang investasi	24037 ijin	6%	7.997		2.495		2.627		2.789		3.214				Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal		
		1. Tingkat pertumbuhan ijin realisasi investasi	N/A			8%		12%		16%		20%		24%		3.377	24%		
		2. Tingkat pertumbuhan jumlah minat dan rencana investasi	N/A			12%		18%		24%		30%		36%			36%		
1.1.2.12.03	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Percentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	70%			72%	24.856	74%	26.174	76%	27.791	78%	32.026	80%	33.652	80%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal		
1.1.2.13	Kepemudaan dan Olahraga																		
1.1.2.13.01	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Akumulasi pemuda yang dapat mengembangkan usaha mandiri	5 orang	10 Orang	10.382		3.561		3.750		3.982		4.588		4.821			Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	
		Cakupan pemuda yang mendapat pembinaan	10915 orang	11615 Orang															
		Akumulasi pemuda sebagai pelopor pembangunan	5 orang	10 Orang															



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)					
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)				
		Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja	80%			80%		80%		80%		80%		80%		80%			
1.1.2.13.02	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Cakupan Pembinaan Atlet Olahraga	1761	1937 Orang	101.914		120.829		127.234		135.096		155.680		163.585		Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kependidikan dan Olahraga		
		Akumulasi Prasarana Olahraga yang dikembangkan	282 lokasi	322 Lokasi															
		Akumulasi Olahraga Rekreasi yang digali, dibina dan dikembangkan di Kota Surabaya	48 Jenis	53 Jenis															
		Cakupan/sebaran fasilitas olahraga	91 kelurahan		103 kelurahan		115 kelurahan		130 kelurahan		142 kelurahan		154 kelurahan		154 kelurahan				
		Akumulasi atlet yang dibina dan berprestasi	857 orang		1107 orang		1357 orang		1607 orang		1857 orang		2107 orang		2107 orang				
1.1.2.14	Statistik																		
1.1.2.14.01	Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik	Rata-rata toleransi (margin of error) pada data-data terkait perhitungan indikator kinerja dalam RPJMD	N/A			5%	2.941	5%	3.097	5%	3.289	5%	3.790	5%	3.982	5%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik		
1.1.2.16	Kebudayaan																		
1.1.2.16.01	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase bangunan dan situs cagar budaya yang terawat dengan baik	89,01%	91,50%	1.066												Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)					
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)				
1.1.2.16.02	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase kelompok seni dan budaya yang difasilitasi	36% (232 kelompok)	40%	7.133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan		
1.1.2.16.03	Program perlindungan budaya lokal	Persentase cagar budaya yang terpelihara	89,01%	-	-	91,50%	1.192	91,50%	1.255	91,50%	1.333	91,50%	1.536	91,50%	1.614	91,50%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan		
1.1.2.16.04	Program pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	1. Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	40%	-	-	44%	5.362	45%	5.646	47%	5.995	48%	6.909	49%	7.260	49%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan		
		2. Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal pada 17 lokasi	47,10%	-	-	52,90%	-	64,70%	-	76,50%	-	88,2%	-	100%	-	100%	100%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	
1.1.2.16.05	Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	1. Persentase partisipasi peserta dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan	14,50%	-	-	15%	13.555	15,50%	14.274	16%	15.156	16,50%	17.465	17%	18.352	17%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan		
		2. Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	100%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	
1.1.2.17	Perpustakaan																		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)					
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)				
1.1.2.17.01	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Rata-rata kunjungan layanan baca per bulan	187172 kunjungan/bulan (2246064 kunjungan)	205889 kunjungan/bulan (2470670 kunjungan)	20.561		24.361		25.652		27.237		31.387		32.981		Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan		
		1. Persentase pertumbuhan event literasi yang diselenggarakan	0% (141 event)			10%		10%		10%		10%		10%		10%		10%	
		2. Persentase koleksi buku	84,05%			86,18%		88,63%		91,56%		95,23%		100%		100%		100%	
		3. Persentase siswa yang terlibat dalam tes reading text levelling	0,69%			20,50%		40,40%		60,30%		80,10%		100%		100%		100%	
		4. Persentase perpustakaan yang berhasil dibina	6,86%			12,90%		17,85%		22,80%		27,74%		33%		33%		33%	
1.1.2.18	Kearsipan																		
1.1.2.18.01	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase SKPD dan unit kerja yang tertib sistem tata karsipan	100%	10,70%	478													Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Karsipan	
1.1.2.18.02	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase SKPD dan unit kerja yang diakuisisi dokumen arsip	11% (8 SKPD)	19% (6 SKPD)	1.933													Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Karsipan	
1.1.2.18.03	Program Penataan, Penyelamatan, dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	1. Persentase jumlah arsip yang diakuisisi	20%			20%	2.245	20%	2.364	20%	2.510	20%	2.893	20%	3.040	20%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Karsipan		
		2. Persentase perangkat daerah, unit kerja, BUMD, dan sekolah negeri yang tertib sistem tata karsipan sesuai ketentuan	8,20%			22,60%		41,70%		60,80%		79,90%		100%		100%		100%	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kota Surabaya 2016 - 2021

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)					
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)				
1.2	Urusan Pilihan																		
1.2.2	Non Pelayanan Dasar																		
1.2.2.01	Kelautan dan Perikanan																		
1.2.2.01.01	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Produktivitas Hasil Olahan Perikanan	10,76 ton/orang	14,16 Ton/Orang	2.415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan		
		Produktivitas Usaha Garam	74,06 ton/ha	81,47 Ton/Ha		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2.2.01.02	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produktivitas tangkapan ikan (termasuk budidaya ikan di laut)	3,18 ton/orang	3,2 Ton/Orang	1.291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan		
1.2.2.01.03	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Produktivitas budidaya perikanan	2,11 ton/ha	2,13 Ton/Ha	1.213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)					
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)				
1.2.2.01.04	Program Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan	Persentase pembudidaya yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana perikanan dan kelautan	N/A			12%	2.415	13%	2.543	14%	2.700	15%	3.112	16%	3.270	16%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan		
1.2.2.01.05	Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Budidaya Perikanan dan Kelautan	Persentase pembudidaya perikanan dan kelautan yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	N/A			25%	363	35%	382	50%	405	65%	467	80%	491	80%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan		
1.2.2.02	Pariwisata																		
1.2.2.02.01	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rata-rata kunjungan wisatawan mancanegara per bulan	53.215 wisatawan/bulan	64.333 wisatawan/bulan	8.035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata		
		Rata-rata kunjungan wisatawan nusantara per bulan	1.258.255 wisatawan/bulan	1.373.168 wisatawan/bulan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2.2.02.02	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rata-rata kunjungan wisatawan nusantara ke ODTW per bulan	256.595 wisatawan/bulan	258.333 wisatawan/bulan	9.627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata		
		Rata-rata kunjungan wisatawan mancanegara ke ODTW per bulan	276 wisatawan/bulan	500 wisatawan/bulan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)					
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)				
1.2.2.02.03	Program pengembangan destinasi wisata	Percentase ODTW yang berhasil dikembangkan	9%			18%	4.506	27%	4.745	36%	5.038	45%	5.806	55%	6.101	55%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata		
1.2.2.02.04	Program pengembangan kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata	Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata yang dilaksanakan 5 kesepakatan	0%			20%	3.691	40%	3.886	60%	4.127	80%	4.755	100%	4.997	100%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata		
1.2.2.02.05	Program Pemasaran Pariwisata	Percentase kunjungan di objek wisata terhadap kunjungan wisatawan	40,94%			43,21%	10.305	45,48%	10.851	47,74%	11.521	50,01%	13.277	52,27%	13.951	52,27%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata		
1.2.2.02.06	Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif	1. Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif kuliner	N/A			5%	1.355	6%	1.427	7%	1.515	8%	1.746	9%	1.834	9%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata		
		2. Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif desain dan fashion	N/A			5%		6%		7%		8%		9%		9%			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)					
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)				
1.2.2.02.07		3. Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif handicraft	N/A			5%		6%		7%		8%		9%		9%			
						5%		6%		7%		8%		9%		9%			
						43,75%		62,50%		81,25%		100%		100%		100%			
1.2.2.02.07	Program legalisasi usaha kreatif	Persentase pelaku usaha kreatif yang mendapatkan legalisasi usaha	N/A			20%	124	25%	130	30%	138	35%	159	40%	167	40%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata		
1.2.2.02.08	Program perkuatan permodalan usaha kreatif	Persentase kebutuhan modal kerja dan modal investasi pelaku usaha kreatif yang dapat dipenuhi	N/A			5%	143	10%	151	15%	160	20%	184	25%	194	25%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata		
1.2.2.03	Pertanian																		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)					
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)				
1.2.2.03.01	Program Pelayanan Pembibitan dan Penyaluhan pertanian/Perkebunan, Perikanan dan Peternakan	Cakupan sebaran penyediaan bibit pada pembudidaya	42,25%	75%	2.896												Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian		
		Persentase kemampuan penyuluh dalam melakukan pendampingan terhadap kelompok tani	80%	80%															
1.2.2.03.02	Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana produksi	N/A			12%	1.595	13%	1.679	14%	1.783	15%	2.055	16%	2.159	16%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian		
1.2.2.03.03	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Produktivitas pada bidang pertanian/perkebunan	3,16 Ton/Ha	3,73 Ton/Ha	4.018												Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian		
1.2.2.03.04	Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	N/A			25%	1.810	35%	1.906	50%	2.023	65%	2.332	80%	2.450	80%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian		
1.2.2.03.05	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan ternak	Persentase populasi hewan ternak yang mendapatkan pengobatan	21,43%	28,62%	793		2.376		2.502		2.657		3.062			3.217		Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	
		Persentase populasi hewan ternak yang mendapatkan vaksinasi	86,72%	89,69%															



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)					
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)				
		Persentase populasi hewan ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan	80%			83%		84%		85%		86%		87%		87%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian		
1.2.2.03.06	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Produktivitas di bidang peternakan	1 Ekor/Kelompok	2 Ekor/Kelompok	1.419												Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian		
1.2.2.03.07	Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Peternakan	Persentase pembudidaya ternak yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	N/A			25%	347	35%	365	50%	388	65%	447	80%	470	80%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian		
1.2.2.06	Perdagangan																		
1.2.2.06.01	Program pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial	1. Persentase realisasi pengembangan hub dan simpul logistik	5%			25%	563	75%	593	100%	630	100%	726	100%	763	100%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan		
		2. Tingkat kelengkapan data gudang terdaftar	15%			30%		50%		75%		100%		100%		100%			
1.2.2.06.02	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan	Persentase Peningkatan Jumlah tempat usaha perdagangan yang tertib ukur	0% (370 tempat usaha)	15%	2.784	1.888		1.988		2.111		2.433		2.556			Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kota Surabaya 2016 - 2021

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)					
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)				
	Perdagangan	Persentase Peningkatan jumlah Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Tertib ukur	3% (12718 UTPP)	3%		70%	75%	80%	85%	85%	85%	85%	85%	85%		Pemerintahan Bidang Perdagangan			
		Persentase temuan yang ditindaklanjuti	N/A																
1.2.2.06.03	Program perluasan jangkauan pemasaran	1. Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	N/A			40%	38.143	50%	40.165	53%	42.647	55%	49.145	60%	51.640	60%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan		
		3. Persentase sentra yang beroperasi secara optimal	20%																
		4. Persentase pembangunan fasilitas ekonomi rakyat	1,2% (169 unit)																
1.2.2.06.04	Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan	1. Tingkat frekuensi intervensi ketersediaan komoditas	15 kali/kejadian			15 kali/kejadian	2.237	15 kali/kejadian	2.356	15 kali/kejadian	2.501	15 kali/kejadian	2.883	15 kali/kejadian	3.029	15 kali/kejadian	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan		
		2. Persentase pasar yang dipantau harganya	8%																
1.2.2.06.05	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian	Persentase pembudidaya yang omzetnya meningkat	60%			61%	942	62%	992	63%	1.053	64%	1.214	65%	1.275	65%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan		
2	Penunjang Urusan Pemerintahan																		
2.1	Fungsi Manajemen																		
2.1.2	Non Pelayanan Dasar																		
2.1.2.01	Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan																		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)					
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)				
2.1.2.01.01	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	1. Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan di aspek waktu	90%			90%	4.857	90%	5.114	90%	5.431	90%	6.258	90%	6.576	90%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan		
		2. Tingkat capaian keberhasilan kegiatan di aspek output	96%			96%		97%		98%		99%		100%		100%			
2.1.2.01.02	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Percentase Kualitas Penyusunan Perencanaan Strategis	60%	60%	17.896		16.843		17.736		18.832		21.702		22.804		Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan		
		Percentase Kualitas Monitoring dan Evaluasi	80%	88%															
		Percentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	60%			100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		Percentase PD lingkup bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas	60%			65%		70%		75%		80%		85%		85%			
		Percentase PD lingkup bidang fisik dan prasarana yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas	60%			65%		70%		75%		80%		85%		85%			
		Percentase PD lingkup bidang ekonomi yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas	60%			65%		70%		75%		80%		85%		85%			
		Keuangan																	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)					
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)				
2.1.2.02.01	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rata-rata Peningkatan PAD	0% (Rp 4.035.649 Juta)	10%	67.123												Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan		
		Persentase Dokumen keuangan yang selesai tepat waktu	94%	100%															
		Persentase laporan aset/barang daerah diterbitkan tepat waktu	100%	100%															
		Rata-rata pertumbuhan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah	0% (Rp. 2.583.381 Juta)	3,44%															
2.1.2.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat ketepatan penyelesaian dokumen keuangan	80%		80%	4.315	80%	4.543	80%	4.824	80%	5.559	80%	5.841	80%		Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan		
2.1.2.02.03	Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	2,87%		14,19%	29.314	22,70%	30.868	33,53%	32.776	68,93%	37.770	81,70%	39.687	81,70%		Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan		
2.1.2.03	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah																		
2.1.2.03.01	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Jenis Pelayanan yang Memiliki SOP	49%	44%	2.451		4.968		5.231		5.555		6.401		6.726		Sekretariat Daerah		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)					
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)				
2.1.2.03.02	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase SKPD yang Tidak Terjadi Tumpang Tindih pada Tugas Pokok dan Fungsinya	100%	100%													Sekretariat Daerah		
		1. Persentase Standar Pelayanan (SP), yang di dalamnya mencakup proses bisnis, yang tersusun	10%			100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		2. Persentase Pendampingan Penyusunan POS (Prosedur Operasional Standar) SKPD	N/A			100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		3. Persentase Prosedur Operasional Standar (POS) dan Standar Pelayanan (SP) Perangkat Daerah yang dievaluasi	N/A			15%		30%		45%		60%		75%		75%			
		4. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang dilakukan evaluasi kelembagaan	100%			100%		100%		100%		100%		100%		100%			
2.1.2.03.03	Program Penataan Daerah Otonom	Persentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan	100%	100%	3.746		3.796		3.997		4.244		4.890		5.139		Sekretariat Daerah		
		1. Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan	100%			100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		2. Persentase produk hukum daerah yang dievaluasi	100%			100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		3. Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	100%	100%												100%	Sekretariat Daerah		
		4. Persentase Produk hukum yang disebarluaskan	100%	100%												100%			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)					
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)				
2.1.2.03.04	Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	1. Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%			100%		100%		100%		100%		100%		100%	Sekretariat Daerah		
		2. Persentase nama rupabumi yang memenuhi syarat untuk diajukan pembakuan	28,13%			42,51%		56,89%		71,27%		85,65%		100%		100%			
		Persentase BUMD yang berkinerja sesuai standar	N/A	50%	1.714		2.350		2.475		2.628		3.028		3.182				
		Persentase kajian/rekomendasi terkait perekonomian yang termanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan	0%	25%															
2.1.2.03.05	Program Peningkatan Kinerja BUMD Pendukung Keuangan Daerah	Persentase kajian/rekomendasi di sektor kesejahteraan rakyat yang termanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan	85,71%			100,00%		100%		100%		100%		100%		100%	Sekretariat Daerah		
		Persentase kajian/rekomendasi terkait perekonomian yang termanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan	N/A			25%		25%		25%		25%		25%		25%			
2.1.2.03.06	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase jumlah kegiatan DPRD yang terfasilitasi dengan baik	100%	100%	90.663												Sekretariat DPRD		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)					
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)				
2.1.2.03.07	Program Peningkatan kapasitas lembaga fasilitator perwakilan rakyat daerah	Persentase kegiatan DPRD terkait rapat dan perundang-undangan yang terfasilitasi	100%			100%	93.386	100%	98.336	100%	104.413	100%	120.321	100%	126.431	100%	Sekretariat DPRD		
		Persentase kegiatan DPRD terkait informasi dan protokol yang terfasilitasi	100%			100%		100%		100%		100%		100%		100%	100%		
2.1.2.03.08	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase terlayaniinya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar	100%	100%	5.669													Sekretariat Daerah	
2.1.2.03.09	Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar	100%			100%	5.899	100%	6.212	100%	6.596	100%	7.601	100%	7.987	100%	Sekretariat Daerah		
2.1.2.03.10	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase MoU kerjasama antar daerah dan pihak ketiga yang memberikan manfaat	100%	80%	14.349		14.866		15.654		16.621		19.153		20.126		Sekretariat Daerah		
		Persentase MOU kerjasama luar negeri yang memberikan manfaat	100%	50%															
		Persentase MoU yang Dievaluasi	0%	22,22%			42,86%		42,86%		42,86%		42,86%		42,86%				
		1. Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti	42,86%																
		2. Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) luar negeri yang ditindaklanjuti	33,33%				33,33%		33,33%		33,33%		33,33%		33,33%				



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)					
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)				
		3. Persentase MoU kerjasama (non perdagangan) yang dievaluasi	22,22%			42,10%		60%		75%		85%		100%		100%			
2.1.2.03.11	Program Kerjasama Bidang Perdagangan	1. Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan yg telah ditandatangani	N/A			42,86%	445	57,14%	468	71,43%	497	85,71%	573	100%	602	100%	Sekretariat Daerah		
		2. Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan tertandatangani yang telah terealisasi	N/A			66,67%		75%		80%		83,33%		85,71%			85,71%		
2.1.2.04	Pengawasan																		
2.1.2.04.01	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Penanganan Pengaduan	100%	100%	4.432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektorat		
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan	100%	89,80%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.2.04.02	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	1. Persentase Penanganan Disiplin Aparatur Wilayah I	100%		5.498	100%	5.790	100%	6.148	100%	7.084	100%	7.444	100%	100%	100%	Inspektorat		
		2. Persentase Penanganan Tata Kelola Administrasi Keuangan Wilayah I	100%			100%		100%		100%		100%							
		3. Persentase Penanganan Disiplin Aparatur Wilayah II	100%			100%		100%		100%		100%							
		4. Persentase Penanganan Tata Kelola Administrasi Keuangan Wilayah II	100%			100%		100%		100%		100%							
		5. Persentase Penanganan Disiplin Aparatur Wilayah III	100%			100%		100%		100%		100%							
		6. Persentase Penanganan Tata Kelola Administrasi Keuangan Wilayah III	100%			100%		100%		100%		100%							



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab													
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)																
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)															
2.2	Unsur Manajemen																													
2.2.2	Non Pelayanan Dasar																													
2.2.2.01	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan																													
2.2.2.01.01	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase data pada Sistem Kepegawaian yang up date	100%	100%	12.975	88,08%	15.557	90,33%	16.382	92,58%	17.394	94,83%	20.045	97,08%	21.062	97,08%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan													
		1. Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural	84,32%	85,84%																										
		2. Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	12,95%	22,11%																										
		3. Persentase terbentuknya dan berfungsiya assessment centre	20%	20%																										
		4. Persentase aparatur yang memiliki kinerja baik	90%																											
2.2.2.02	Sarana dan Prasarana Perkantoran																													
2.2.2.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	N/A	70%	408.261	72%	383.256	74%	403.572	76%	428.511	78%	493.802	80%	518.873	80%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Sarana dan Prasarana Perkantoran													
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	N/A	90%																										
2.2.2.02.02	Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kendaraan yang berfungsi dengan baik	68,91%	75%	34.198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Sarana dan Prasarana Perkantoran														
		Persentase pemanfaatan barang sesuai dengan rencana	86,87%																											



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)					
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)				
2.2.2.02.03	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur	N/A	70%	249.219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Sarana dan Prasarana Perkantoran		
2.2.2.02.04	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinisan	1. Persentase pemanfaatan aset	90%	91%	274.121	92%	288.651	93%	306.489	94%	353.188	95%	371.120	95%	371.120	95%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Sarana dan Prasarana Perkantoran		
		2. Persentase sistem informasi pemerintah kota surabaya yang diintegrasikan dengan sistem informasi barang daerah	0%	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Sarana dan Prasarana Perkantoran		
		3. Persentase kendaraan yang berfungsi dengan baik	75%	77%	79%	79%	81%	81%	83%	83%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Sarana dan Prasarana Perkantoran		
		4. Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik	67,95%	74,36%	80,77%	80,77%	87,18%	87,18%	93,59%	93,59%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Sarana dan Prasarana Perkantoran		
		5. Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Sarana dan Prasarana Perkantoran		
		6. Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Sarana dan Prasarana Perkantoran		
Total Kebutuhan Pendanaan				5.566.748		5.919.951		6.233.756		6.618.985		7.627.492		8.014.763					

Keterangan

- Program Prioritas
- Tidak dilaksanakan

Keterangan: Seluruh indikator terkait dengan pendidikan menengah bersifat tentatif.